

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta;
- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- Ateng Syarifudin, 1992, *Pengurusan Perizinan*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan ST Aloysius, Bandung;
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung;
- Dellyana Shanty, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta;
- Koesnadi Hardjosoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta;
- Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Muladi, 1994, *Teori – teori Kebijakan Pidana*, PT.Alumni, Bandung;

Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar garafika, Jakarta;

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta;

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta;

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto;

Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta;

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang;

Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan (Dibawah Rezim UU No.4 Tahun 2009)*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Jurnal

Departemen Pendidikan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;

Kebutuhan Laporan Akhir Analisis Persediaan, Kebutuhan dan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C Prospektif Kabupaten Kebumen Tahun 2015;

Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society an Introduction*, New Jersey, Prentice Hall Inc;

Jimly Asshiddiqie, 2003-2008, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, Jakarta, hlm.1-2

Phiiipus M. Hadjon, Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan iingkungan Hidup, dalam B.Arief Sidharta, dkk (Editor), Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemen'tahan yang Layak, Penerbit PI CitraAditya Bakti, Bandung, 1996, him 339 - 341. Uhatjuga Phiiipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, him 241;

Zafruilah Salim, Ulasan terhadap Beberapa Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, bahan untuk acara implementasi UU10/2004, yang diselenggarakan oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan bekerja

sama dengan Kanwil Dep. Hukum dan HAM DIY, tanggal 20 Oktober 2005, hlm 4-5.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 c ;

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan;

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

PP No.77 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Peraturan Daerah (Perda) Kebumen Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;

PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamoing Praja perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).

Internet

<https://kbbi.web.id/tambang>, di unduh , 12 Maret 2017, Pukul 19.23 WIB

<http://www.hukumpertambangan.com>, , 17 Maret 2017, Pukul 19.45 WIB

<http://www.negarahukum.com/hukum/proses-peradilan-pidana.html> (Diakses 1 April 2016) di unduh pada hari rabu 10 mei 2017;

<http://kehidupannasution.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-pertambangan-penambangan-dan.html>, 12 Maret 2017, Pukul 19.23 WIB;

<http://www.bpk.go.id> Kategori C, pertambangan dan Penggalan, 17 Maret 2017, Pukul 19.23 WIB;

<http://www.Aditya.tambang.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-pertambangan-sesuai-uu.html>, 7 Februari 2017, Pukul 19.30 WIB;

<http://www.http://ide.bangunan.blogspot.com/2012/08/jenis-beda-pasir-berdasarkan-kegunannya.html>, diakses pada hari selasa tanggal 5 februari 2017 pukul 06.30 WIB.

Suaramerdeka.Com /LintasKebumen2015 Posted in Kebumen Utara and tagged Penambangan pasir, satpol pp on October 7, 2015 , 02.26 WIB.